



InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan

ISSN (Print) 2540-7597 | ISSN (Online) 2540-7600



Available online at : <http://bit.ly/InfoTekJar>

Studi Empirik e-Government Terhadap *Public Service* Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Muhammad Wahyudi, Darius Antoni, Dedy Syamsuar, M. Izman Herdiansyah

Program Pascasarjana, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

KEYWORDS

e-government, e-service, information technology

CORRESPONDENCE

Phone: 081273691390

E-mail: darius.antoni@binadarma.ac.id

A B S T R A C T

Pemanfaatan teknologi informasi di era saat ini dibutuhkan untuk menunjang dalam kemudahan aktivitas di segala bidang dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Pemerintah terus melakukan inovasi dan pengembangan layanan berbasis elektronik yakni *e-government*. *E-gov* akan meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik berbasis digital dengan mengarah *good governance*. Pemerintah Kabupaten Muara Enim memiliki 1521 perusahaan dan 61 SKPD/dinas terkait. Sampel yang digunakan berjumlah 295. Dari dimensi yang digunakan menunjukkan hasil bahwa SP2D terhadap *usability* sebesar 94 persen, *information quality* sebesar 91 persen, *service interaction* sebesar 81 persen, *quick accessible and ease of use* sebesar 88 persen dan *information adequacy and website design* sebesar 87 persen.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dibidang *information technology* akan membuat peluang serta tantangan seperti *to create, to access, to process, dan to utilize* informasi yang lebih akurat dan cepat. Hal ini menjelaskan bahwa dari sisi penggunaan *information technology* ini memberikan suatu peluang yang cukup besar bagi manusia khususnya para programmer untuk menghasilkan karya yang baik dan berguna.

Penggunaan *information technology and communication* sangat memudahkan dalam menunjang kegiatan kerja apabila dibandingkan dengan cara manual. Banyak hal yang dapat dirasakan oleh manusia dari sisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk membantu tugas ataupun kegiatan mereka kesehariannya seperti contoh pada era sebelumnya untuk kegiatan administrasi dalam bentuk pelayanan publik (*public services*),.

E-Government merupakan sebuah sistem yang mana penggunaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk membawa perubahan terhadap masyarakat baik secara bisnis dan unit lain dari pemerintahan dengan memanfaatkan dan penggunaan dari segi teknologi

informasi (Alif & Warsono, 2019; Atthahara, 2018; Suyanto, Lestari, Wardiyono, Wuryaningsih, & Widyastuti, 2019).

Menurut Sukarno-Hatta, Gerung, Barat, and MATARAM (2016), menjelaskan bahwa *e-Government* merupakan kombinasi dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi dengan fungsi manajemen yang ada pada pemerintahan. Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu *E-Government* dapat juga merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk pemanfaatan sebuah teknologi baru untuk memberikan layanan dan melayani masyarakat terhadap akses informasi dari pelayanan pemerintah yang nyaman. Penerapan *e-Government* di Indonesia di fokuskan pada pembuatan berbagai aplikasi untuk layanan G2G, G2B, dan G2C yang saling terintegrasi..

Menurut penelitian yang telah dilakukan bahwa perkembangan *e-government* di negara Indonesia dibandingkan dengan negara dikawasan asia tenggara menunjukkan kemunduran yang telah dirilis oleh PBB di publicadminisrastian.un.org dengan menempatkan Indonesia di posisi 116 dari 193 negara.(Masyhur, 2017).

Menurut Puspitasari and Kurniawan (2021), *electronic administration* adalah ungkapan dari *e-gov* yang diberikan

untuk pemerintahan yang telah mengadopsi teknologi yang berbasis teknologi berupa *internet*, *intranet* yang dapat melengkapi serta meningkatkan pelayanan (Rahayuda, 2017). menurut (Kelibay, Nurmandi, & D Malawani, 2020) mendefinisikan bahwa *e-Government* adalah penggunaan suatu teknologi informasi (*information technology*) untuk meningkatkan hubungan antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan.

Menurut (Puspitasari & Kurniawan, 2021) fungsi – fungsi yang ada di *E- Government* ada 4 yaitu :

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor.
2. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur penerapan sistem kesehatan berbasis *e-government*, yakni: Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan usaha pemerintah dalam mengembangkan pelayanan yang berbasis *information technology* dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Instruksi Presiden), dan dikutip dari penelitian (Jaliyanti, 2018) terdapat juga peraturan mengenai bidang kesehatan seperti tertuang pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Indonesia, 2009), Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Permenkes No. 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam Medis (Nomor). Peraturan ini mengatur bagaimana tata kelola pemerintah dibidang kesehatan, hal ini dilakukan agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara optimal dengan memanfaatkan *information technology* (IT) untuk memberikan kemudahan dalam penerapan layanan publik (*public service*) yang baik.

METODOLOGI

Research ini adalah menggunakan *quantitative research* yang merupakan proses untuk menentukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat ukurnya (margono2007:105) dikutip dari (Masri, 2010) dan (Imron, 2017; Kartika & Husna, 2018). dapatlah dijelaskan bahwa *quantitative research* merupakan suatu metode dari penelitian yang menggunakan data angka dalam teknik pengukuran untuk mendapatkan sebuah analisa yang tepat dari persoalan fenomena yang terjadi sehingga menjadi suatu simpulan secara umum.

Untuk pengambilan sampel harus menggunakan teknik tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada Sugiyono (2011:81) dikutip oleh (Handayati, 2016). Untuk sampel dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perhitungan sampel

Jumlah	Teori Isaac & Michael 1%	Teori morgan & Krecjie
1582	283	306
Rata –rata	835/2	
294,5 Sampel		

Menurut Sugiyono (2016:156) dikutip dari (Barlian, 2018), dalam pengambilan data dapat dilakukan berbagai cara dan sumber. Dalam pengambilan data tersebut Teknik yang digunakan adalah kuesioner dengan responden yang akan diteliti sehingga datanya akurat.

Skala yang digunakan untuk mengukur dari pendapat/persepsi dari responden dengan memberikan penilaian dari angka 1,2,3,4, dan 5 dengan keterangan sebagai berikut: nilai (1), pernyataan sangat tidak setuju, nilai (2), tidak setuju, nilai (3), kurang setuju, nilai (4) kurang setuju dan nilai (5) sangat setuju. Untuk respon yang paling positif diberikan penilaian dengan angka (5) yang menyatakan sangat setuju dan respon yang paling negative diberikan penilaian dengan angka (1).

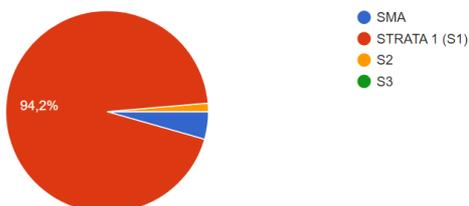
Untuk dimensi *e-service quality* terdiri dari *Website Usability*, *Information Quality*, *Reliability*, *Responsiveness*, *Assurance*, *Personalization* (Romadhan, Indriastuty, & Prihandoyo, 2019) Untuk dimensi *perceived usefulness* terdiri dari *Productivity*, *Supporting*, *Easier*, *Quickly*, *Performance*, and *Useful*. (Haning, 2021).

Tabel 2. Dimensi Pengukuran

No	Dimensi	Indikator
1	Usability	Mudah dalam pengoperasian (Ease of operate)
		Interaksi mudah dipahami (Interaction)
		Navigasi dapat dipahami (navigating)
		Terlihat menarik (interesting)
		Meyakinkan dan berkompeten (convincing and competent)
2	Information Quality	Positif atau menambah pengalaman (positive or absolute experience)
		Informasi yang tepat (proper information)
		Informasi dapat diandalkan (reliable output)
		Informasi tepat waktu (timely information)
		Informasi yang relevan (relevant information)
		Sederhana untuk diwujudkan (simple to realize)
		informasi secara rinci (detailed information)
		Sesuai ketentuan (according to format)
		Reputasi yang baik (good reputation)
		Aman dan terlindungi (protected transactions)
3	Service Interactioun	Informasi pribadi (personal information)
		menjamin penyimpanan informasi (safekeeping of personal information)
		Gambaran yang baik dilingkungan (good image)
		Komunikasi yang baik (convenient to communicate)
		Sesuai janji/harapan (promised)
		Mekanisme mendapatkan informasi (Facilitate the reach and retrieve targeted)
		Mesin pencari yang membantu pengguna (search engine)
4	Quick accessible and Ease of use	Menggunakan semua pilihan (enable to use options)
		Tanpa kendala, mudah dan nyaman (functions and services in Smooth, comfort)
		Sederhana dan jelas (simplicity and clearly)
		Puas dan relevan (satisfied and relevant)
5	Information Adequacy and Website design	Sesuai dengan kebutuhan (information provided to users requirements)
		Arsitektur (Architecture)
		Penyajian (presenting)
		Desain (Design)

Konsep analisis faktor ini berfokus pada pengukuran *measurement model* sedangkan konsep regresi berfokus pada *structural model*. Model yang diukur menjelaskan *relationship* antara variabel terhadap indikator yang ada sedangkan model structural mendefinisikan antar variabel (Hadjam & Widhiarso, 2011).

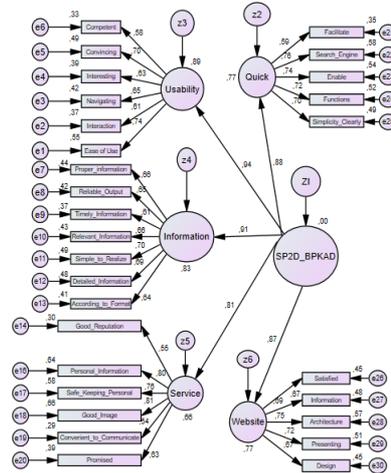
HASIL DAN DISKUSI



Gambar 1. Responden Berdasarkan Pendidikan

Gambar 1 merupakan responden berdasarkan jenjang pendidikan yang memberikan jawaban terhadap kuesioner, yakni; jenjang strata 1 sebanyak 94,2 persen atau sebanyak 248 orang. Jenjang pendidikan S2 sebanyak 1.4 persen atau sebanyak 4 orang, dan dari jenjang pendidikan SMA sebanyak 4.4 persen atau sebanyak 13 orang.

Hasil uji validitas $r_{hitung} > r_{tabel}$ diperoleh dari 295 sampel yang digunakan perolehan nilai yang dicapai diatas dari r_{tabel} yakni 0.113 sedangkan uji reliabilitas diperoleh *cronbach α* sebesar 0,949.



Gambar 2. Hasil Uji Second Order Test Amos

Tabel 3. Model Fit of Covarience

HASIL PERHITUNGAN AMOS – Covarience									
	CMI	D	P	CMIN	G	AG	IF	T	C
	N	F		/DF	FI	FI	I	LI	FI
Default	1447.	3							
Model	937	7	0	3.892	.7	.719	.7	.7	.7
		2			60		70	47	69

Hasil yang diperoleh dari pengukuran bahwa SP2D di BPKAD Muara Enim dalam penggunaannya bagi para pengguna layanan tersebut terhadap dimensi yang digunakan peneliti dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil

→	usabilit y	Informati on Quality	Service Interacti on	Quick Accessib le and Ease of Use	Informati on Adequacy and Website Design
SP2D_BPK AD	.94	.91	.81	.88	.87

KESIMPULAN

Dari keempat dimensi yang digunakan ada satu indikator yakni *protected transactions* yang tidak dapat diuji karena memiliki tingkat kepercayaan dari responden rendah yakni sebesar .48 atau sebesar 48 persen. Sedangkan indikator ini sangat penting dalam segi keamanan dan perlindungan terhadap dokumen *online* yang dimiliki pihak *user*.

Semua dimensi mendapat respon yang positif dari para responden ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh semua diatas 80 persen.

REFERENCES

- Alif, M., & Warsono, H. (2019). ANALYSIS DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT ON PROVISION OF INFORMATION ACCESS IN CENTRAL JAVA'S PROVINCE LIBRARY. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 510-524.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66-66.
- Barlian, E. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Hadjam, M. N. R., & Widhiarso, W. (2011). *Efikasi mengajar sebagai mediator peranan faktor kepribadian terhadap performasi mengajar guru*: Universitas Ahmad Dahlan.
- Handayati, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja Karyawan di Bank Jatim Cabang Lamongan (Suatu Studi pada Bank Jatim Cabang Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(2), 14 Halaman.
- Haning, M. T. (2021). Pengaruh Trust Dan Perceived Ease Of Use Terhadap Intention Kaum Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi E-Commerce Shopee Yang Dimediasi Oleh Perceived Of Usefulness. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(1), 1-10.
- Imron, H. A. (2017). Peran Sampling dan Distribusi Data dalam Penelitian Komunikasi Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 21(1), 111-126.
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jakarta Republik Indones*.
- Instruksi Presiden, R. No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan. *E-Government*.
- Jaliyanti, D. (2018). Analisis Penerapan E-Health Sebagai Perwujudan Pelayanan Prima Di Puskesmas Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 6(2).
- Kartika, Y., & Husna, N. (2018). MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA MATERI SIFAT-SIFAT BANGUN RUANG DENGAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DI KELAS VI SD NEGERI 1 SAWANG. *Jurnal Pendidikan Almustim*, 6(2).
- Kelibay, I., Nurmandi, A., & D Malawani, A. (2020). e-Government Adoption of Human Resource Management in Sorong City, Indonesia. *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*, 5(1).
- Masri, A. (2010). *Persepsi siswa terhadap kompetensi profesional guru agama hubungannya dengan intensitas belajar siswa pada mata pelajaran PAI: penelitian pada siswa kelas VIII di SMP PGRI 10 Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI). *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 19(1), 51-62.
- Nomor, P. W. S. Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Puspitasari, D. A., & Kurniawan, T. (2021). Mitigasi Kegagalan Guna Mewujudkan Keberlanjutan E-Government. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 4(1), 104-118.
- Rahayuda, I. G. S. (2017). Implementasi Teknologi Informasi Untuk Mengembangkan E-Government Menggunakan Framework Laravel. *Semasteknomedia Online*, 5(1), 2-4-7.
- Romadhan, M. R., Indriastuty, I., & Prihandoyo, C. (2019). E-Service Quality Kepuasan Konsumen Melalui E-Commerce Terhadap Loyalitas Konsumen. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 150-163.
- Sukarno-Hatta, J., Gerung, G. M., Barat, N. T., & MATARAM, I. K. (2016). Integrasi Data Dalam Proses Layanan Publik Menuju Percepatan E-Government. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 1(1).
- Suyanto, E., Lestari, S., Wardiyono, F., Wuryaningsih, T., & Widyastuti, T. R. (2019). Community participation model in formulating cross-potential mangrove ecotourism policies supporting kampung laut sustainable tourism village. *IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology*, 13(8), 1-09.